

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pemberdayaan Masyarakat

2.1.1.1 Definisi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti kekuatan, dan merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris "*empowerment*." Dalam hal ini, pemberdayaan mengandung makna memberikan kekuatan atau kemampuan kepada kelompok rentan yang belum mampu hidup mandiri, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Tanggung jawab untuk memberikan kekuatan ini memang terletak pada pemerintah, tetapi dukungan aktif dari masyarakat sebagai kelompok sasaran sangat diperlukan agar program pemberdayaan dapat berjalan dengan efektif (Hamid, 2018, hlm. 9).

Pemberdayaan dalam perspektif ilmu sosial, sering dipahami sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan individu atau kelompok dalam masyarakat. Kelompok masyarakat (*community groups*) terdiri dari individu-individu yang berada di suatu wilayah tertentu, terikat oleh kebersamaan, dan berinteraksi secara sosial (Amalia & Syawie, 2015, dalam Firman, 2021, hlm. 3). Pemenuhan kebutuhan masyarakat mencakup aksesibilitas terhadap sumber daya dan kegiatan sosial lainnya. Dengan demikian, pemberdayaan berfungsi sebagai sarana dan proses untuk meningkatkan kemampuan serta kemandirian masyarakat.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Mardikanto dan Soebiato (2012) dalam Wasito et al. (2022, hlm. 52) menjelaskan bahwa pemberdayaan sebagai proses adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat daya dan kemampuan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang berada dalam kemiskinan. Melalui proses ini, kelompok rentan diharapkan mampu berpartisipasi, mendapatkan akses ke sumber daya dan layanan, serta meningkatkan kualitas hidup mereka.

Menurut (Margayaningsih, 2018, hlm. 79) pemberdayaan masyarakat sangat penting dan harus dilakukan, mengingat perkembangan ekonomi dan teknologi yang sangat pesat dapat memengaruhi kemampuan setiap individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mengikuti perkembangan zaman dengan tujuan untuk:

- a. Membangun individu yang mandiri dalam masyarakat.
- b. Menciptakan lingkungan kerja yang memiliki etos baik, sehingga terbentuk kondisi kerja yang sehat dan saling menguntungkan.
- c. Membentuk masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi akan potensi diri dan lingkungannya.
- d. Melatih masyarakat dalam perencanaan dan pertanggungjawaban atas tindakan mereka untuk memenuhi kebutuhan, serta meningkatkan kemampuan berpikir, bernegosiasi, dan mencari solusi atas permasalahan di lingkungan.
- e. Mengurangi angka kemiskinan dengan meningkatkan potensi dan kemampuan dasar masyarakat.

2.1.1.2 Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan (*empowerment*) merupakan konsep yang berkaitan menggunakan kekuasaan (*power*). Istilah kekuasaan seringkali identik dengan kemampuan individu untuk membentuk dirinya atau pihak lain melakukan apa yang diinginkannya. Kemampuan tersebut baik untuk mengatur dirinya, mengatur orang lain menjadi individu atau kelompok atau organisasi, terlepas dari kebutuhan, potensi, atau keinginan orang lain. Menggunakan kata lain, kekuasaan menjadikan orang lain menjadi objek dari pengaruh atau keinginan dirinya (Margayaningsih, 2018, hlm. 77).

Konsep pemberdayaan mencakup pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan berbasis masyarakat (*community-based development*). Untuk memahami hal ini lebih lanjut, penting untuk memahami konsep keberdayaan dan pemberdayaan masyarakat. Individu yang telah mencapai kemandirian kolektif dapat diberdayakan lebih lanjut melalui upaya mereka sendiri, dengan mengakumulasi pengetahuan, keterampilan, serta sumber daya lainnya. Ini

bertujuan agar mereka mampu mencapai tujuan tanpa ketergantungan pada bantuan eksternal (Mardikanto, 2012, dalam Arfianto & Balahmar, 2014, hlm. 56).

Menurut Chambers (1995) dalam Muhajarah et al. (2023, hlm.217) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan konsep pembangunan ekonomi yang mencerminkan nilai-nilai sosial. Dalam pengembangan komunitas usaha, pemberdayaan tidak hanya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga pada pencarian alternatif untuk pertumbuhan ekonomi lokal. Hal ini memungkinkan pemanfaatan potensi yang ada, sehingga terjadi transisi dari model tradisional ke yang lebih modern.

Konsep pemberdayaan ini muncul dari realitas individu atau kelompok yang tidak berdaya (*powerless*). Ketidakberdayaan ini dapat dilihat dari kurangnya pengetahuan, pengalaman, sikap, keterampilan, modal usaha, jaringan (*networking*), semangat, kerja keras, dan ketekunan. Keterbatasan dalam aspek-aspek tersebut menyebabkan ketergantungan dan kemiskinan. Pemberdayaan (*empowerment*) berhubungan erat dengan kekuasaan (*power*) yang sering kali diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk memengaruhi tindakan orang lain atau dirinya sendiri sesuai keinginannya. Dengan pemberdayaan, daya diberikan kepada kelompok yang lemah, dan kekuasaan yang berlebihan pada kelompok yang kuat dikurangi, sehingga tercipta keseimbangan (Djohani, 2003, dalam Margayaningsih, 2018, hlm. 77).

Adapun, konsep dasar pemberdayaan masyarakat terdiri dari beberapa aspek penting yang saling berkaitan, yaitu keterlibatan aktif, peningkatan kemampuan, dan pembangunan, antara lain :

a. Partisipasi Aktif

Menurut Adisasmita (2006) dalam Hasim & Rohman (2017, hlm. 113), keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan dapat dipahami sebagai partisipasi masyarakat. Sementara itu, menurut Isbandi (2007) dalam Hasim & Rohman (2017, hlm. 117) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat mencakup keikutsertaan dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada, pemilihan maupun

pengambilan keputusan terkait alternatif solusi, keterlibatan dalam pelaksanaan upaya mengatasi masalah serta evaluasi terhadap perubahan yang terjadi.

b. Peningkatan Kapasitas

Menurut Kabeer (2005) dalam Jannah (2024, hlm. 151-152) menyatakan bahwa peningkatan kapasitas masyarakat merupakan strategi yang efektif untuk pemberdayaan. Dengan memperluas akses ke pendidikan nonformal, masyarakat dapat mengembangkan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga daya saing mereka dapat meningkat. Pendidikan nonformal mencakup berbagai program, seperti kursus pelatihan keterampilan, workshop, dan inisiatif pendidikan berbasis komunitas. Melalui pendekatan ini, pemberdayaan masyarakat memungkinkan mereka memperoleh keterampilan yang meningkatkan peluang kerja, membantu mengatasi ketidakpastian ekonomi, dan pada akhirnya, meningkatkan partisipasi aktif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

c. Pembangunan

Pembangunan adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pembangunan mencakup upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, serta memperkuat kapasitas dan kemandirian masyarakat. Melalui metode yang inklusif dan partisipatif, pembangunan bertujuan untuk menciptakan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga hasilnya dapat dirasakan secara optimal oleh semua pihak dan berkontribusi pada kemajuan yang berkelanjutan (Muslim, 2012, dalam Firman, 2021, hlm 3). Keberhasilan pembangunan sangat tergantung pada masyarakat, sementara pemerintah berperan sebagai fasilitator dan sumber dana. Oleh karena itu, masyarakat harus menjadi subjek yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan, bukan hanya menjadi objek pembangunan (Jayadisastra & Lasinta, 2023, hlm. 14).

2.1.1.3 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan utama dari pemberdayaan masyarakat merupakan untuk membangun kekuatan dalam diri masyarakat, khususnya bagi kelompok yang

rentan dan mengalami ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan tersebut dapat bersumber dari faktor internal seperti memiliki pendapat yang buruk tentang diri sendiri atau faktor eksternal seperti ketidakadilan sosial. Melalui proses pemberdayaan, diharapkan masyarakat dapat mencapai taraf hidup yang lebih baik dan memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Lebih jauh lagi, pemberdayaan bertujuan menciptakan masyarakat yang mandiri, tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam bidang sosial, budaya, kebebasan berpendapat, hingga kemampuan menentukan hak-hak politik secara mandiri (Hamid, 2018, dalam Habib, 2021, hlm. 108).

Adapun, menurut Sumaryadi (2005) dalam Putra (2018, hlm. 33) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk:

- a. Mendorong terwujudnya pengembangan diri masyarakat secara menyeluruh dan autentik, terutama bagi kelompok yang lemah, miskin, terpinggirkan, rentan dan masyarakat kecil, seperti petani kecil, buruh tani, masyarakat miskin di daerah perkotaan, penduduk asli yang kurang beruntung, pemuda yang mencari pekerjaan, penyandang disabilitas, serta perempuan yang mengalami diskriminasi;
- b. Meningkatkan kapasitas sosial dan ekonomi kelompok-kelompok tersebut agar mereka mampu menjadi lebih mandiri, memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri sambil berpartisipasi aktif dalam penciptaan masyarakat yang berkelanjutan.

Kesimpulan dari tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah untuk memungkinkan masyarakat—terutama kelompok terpinggirkan dapat mengelola sumber daya mereka secara mandiri dan memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka.

2.1.1.4 Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam pelaksanaan program pemberdayaan, terdapat tiga tahapan penting yang harus dilakukan Wrihatnolo & Dwidjowijoto (2007) dalam Endah (2020, hlm. 138), yaitu:

a. **Penyadaran**

Tahap penyadaran bertujuan untuk membangun pemahaman masyarakat bahwa setiap orang mempunyai potensi yang dapat direalisasikan untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

b. **Penguatan kapasitas**

Setelah individu memiliki kesadaran, langkah selanjutnya adalah memperkuat kemampuan atau kapasitas mereka agar siap menerima dan mengelola daya. Tahap ini dikenal sebagai *capacity building* dan mencakup pengembangan kapasitas pada aspek individu, kelembagaan, serta sistem nilai.

c. **Pendayaan**

Pendayaan merupakan tahap pemberian daya, kewenangan, atau kesempatan kepada masyarakat agar mereka mampu berkembang secara mandiri. Pemberian daya ini disesuaikan dengan tingkat keterampilan dan kecakapan masing-masing individu.

2.1.1.5 Peran Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat berperan untuk mengubah perilaku masyarakat supaya menjadi mandiri dan mampu meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraannya. Menurut Mardikanto et al. (2014) dalam Afriansyah et al. (2023, hlm. 8-9) pemberdayaan masyarakat memiliki beberapa peran utama, yaitu:

a. **Perbaikan Kelembagaan (*Better Institution*)**

Melalui perbaikan kegiatan yang dilaksanakan, kelembagaan dapat diperkuat. Kelembagaan yang kokoh mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan.

b. **Perbaikan Usaha (*Better Business*)**

Perbaikan kelembagaan diharapkan mampu mendukung pengembangan usaha, sehingga memberikan manfaat baik bagi anggota lembaga maupun masyarakat di sekitarnya.

c. **Perbaikan Pendapatan (*Better Income*)**

Perbaikan usaha yang berhasil dapat meningkatkan pendapatan anggota lembaga dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk memperbaiki penerimaan keuangan masyarakat.

d. Perbaikan Lingkungan (*Better Environment*)

Perbaikan pendapatan yang lebih baik diperkirakan akan membantu perbaikan kondisi lingkungan fisik dan sosial, mengingat kerusakan lingkungan sering dikaitkan dengan kemiskinan atau pendapatan terbatas.

e. Peningkatan Kehidupan (*Better Living*)

Pendapatan dan kondisi lingkungan yang membaik akan meningkatkan standar hidup masyarakat, terlihat dari aspek kesehatan, pendidikan, dan daya beli. Peningkatan ekonomi memungkinkan masyarakat menjalani kehidupan yang lebih sejahtera.

f. Perbaikan Bermasyarakat (*Better Community*)

Jika setiap keluarga mampu meningkatkan kualitas hidupnya, hal ini akan menciptakan kondisi kehidupan masyarakat secara keseluruhan yang lebih baik. Oleh karena itu, diperlukan peran peningkatan dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain itu, menurut Suharto (2005) dalam Imron (2017, hlm. 3) pemberdayaan berperan untuk meningkatkan kemampuan individu, khususnya kelompok rentan, agar mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk mendapatkan akses ke sumber daya produktif, serta berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam hal ini, pemberdayaan dilakukan melalui edukasi, pendampingan, dan penerapan teknik hidroponik yang tidak hanya membantu masyarakat memahami konsep pertanian modern tetapi juga mendorong mereka untuk berkontribusi aktif dalam pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.

Adapun, peran edukasi dalam pemberdayaan masyarakat untuk proses pemberdayaan dan pengembangan individu orang untuk memenuhi kebutuhan perkembangan serta menyesuaikan diri dengan tuntutan sosial, budaya, dan religius dalam lingkungannya. Sebagai proses alami, edukasi berperan penting dalam membangun kapasitas masyarakat, mengembangkan keterampilan, serta meningkatkan kesadaran dan kemandirian (Nurhayati, 2015, hlm. 1)

Dalam program pengembangan hidroponik, edukasi menjadi bagian dari peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengelola sistem hidroponik secara mandiri (Rozikin, 2023, hlm. 41-42) pemberdayaan masyarakat melalui edukasi tidak

hanya berkontribusi pada pelaksanaan program, tetapi juga memungkinkan masyarakat untuk menstimulasi dan mendorong proses sosial, sehingga pendidikan memiliki peran penting dalam memberdayakan masyarakat berpartisipasi secara aktif dengan memberikan masukan berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang mereka miliki, yaitu:

1) Peningkatan Kesadaran

Peningkatan kesadaran dalam program pengembangan hidroponik dimulai dengan menghubungkan individu dengan kondisi lingkungan dan sosial di sekitarnya. LPM berperan dalam membantu masyarakat memahami pentingnya sistem hidroponik sebagai solusi pertanian berkelanjutan. Kurangnya pemahaman mengenai dampak lingkungan sering kali menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, LPM mendorong kelompok penerima manfaat untuk membangun kesadaran kolektif agar mampu mengatasi keterbatasan yang ada dan mendukung keberlanjutan program.

2) Pemberian Informasi

Dalam pemberdayaan masyarakat, informasi yang akurat dan relevan sangat dibutuhkan agar program dapat berjalan secara efektif. LPM berperan sebagai sumber informasi utama bagi kelompok penerima manfaat, khususnya terkait teknik hidroponik, manfaat lingkungan, serta strategi pemasaran hasil panen. Penyampaian informasi ini dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan secara berkala.

3) Pelatihan

Salah satu aspek utama dalam pemberdayaan masyarakat adalah pelatihan, yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan kelompok penerima manfaat dalam mengelola sistem hidroponik. LPM tidak selalu bertindak sebagai penyelenggara pelatihan, tetapi lebih berperan sebagai penghubung yang mencari tenaga ahli atau mitra yang memiliki kompetensi dalam bidang hidroponik. Dengan adanya pelatihan yang tepat sasaran, masyarakat diharapkan dapat menerapkan sistem hidroponik secara mandiri dan berkelanjutan.

2.1.2 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah organisasi yang dibentuk atas inisiatif masyarakat dengan dukungan pemerintah desa melalui proses musyawarah dan mufakat. LPM berperan sebagai mitra pemerintah desa dalam menyalurkan serta merealisasikan aspirasi masyarakat. Selain itu, lembaga ini turut membantu pemerintah desa dalam mengendalikan masyarakat serta merencanakan kebutuhan pembangunan secara partisipatif (Indriyani, 2022, hlm. 27).

Menurut Suyatno (2009) dalam Darmawansyah (2017, hlm. 141), istilah Lembaga Kemasyarakatan dapat dilihat dari dua aspek; Pertama, dalam bahasa Indonesia, lembaga ini dikenal dengan istilah pranata sosial, bangunan sosial, dan lembaga kemasyarakatan yang menggambarkan struktur sosial, serta interaksi antarindividu. Kedua, lembaga ini mencakup bentuk dan makna yang lebih abstrak, yang mengandung norma-norma dan peraturan tertentu sebagai ciri khas dalam perencanaan pembangunan. Secara keseluruhan, lembaga kemasyarakatan dijalankan oleh masyarakat desa dengan norma dan peraturan yang berlaku.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) adalah sebuah organisasi yang dibentuk berdasarkan inisiatif masyarakat untuk menjadi mitra pemerintah dalam menampung dan menyuarakan aspirasi, serta kebutuhan masyarakat, khususnya dalam bidang pembangunan. LPMK beroperasi di tingkat kelurahan dan merupakan lembaga lokal yang pengurusnya berasal dari, oleh, dan untuk masyarakat itu sendiri (Winata, 2018, hlm. 9). Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan pada Pasal 10 dijelaskan bahwa pembentukan lembaga kemasyarakatan di kelurahan dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat. Pembentukan lembaga ini bertujuan untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai gotong royong serta kekeluargaan yang menjadi fondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

Sebagai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) memiliki peran dalam menyuarakan aspirasi masyarakat dan menyalurkannya ke dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan. Salah satu bentuk peran tersebut yaitu Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan, yang menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam menentukan prioritas

pembangunan. Dalam hal ini, LPM berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah untuk memastikan bahwa kebutuhan yang diusulkan benar-benar mewakili kepentingan warga. Adapun, tujuan musrenbang Kelurahan yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas partisipasi seluruh unsur pelaku pembangunan.
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
- c. Memeratakan pembangunan dan hasil-hasilnya secara berkeadilan.
- d. Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan di tingkat RT/RW/Lingkungan.
- e. Menetapkan prioritas kegiatan kelurahan yang akan dibiayai dari dana murni swadaya masyarakat.
- f. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan ke forum musrenbang lebih atas untuk diusulkan mendapat alokasi pendanaan dari APBD Kota, APBD Provinsi, APBN, maupun sumber dana lainnya (Ikbar, 2016, hlm. 22).

2.1.2.1 Tugas dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Tugas lembaga pemberdayaan masyarakat, sebagaimana dinyatakan oleh Widjaja (2012) dalam Darmawansyah (2017, hlm. 141) yaitu membuat rencana pembangunan partisipatif, mendorong kemandirian masyarakat, dan melaksanakan serta mengelola pembangunan. Selain itu, tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) adalah membantu Pemerintah Desa serta menjadi mitra dalam peran pemberdayaan masyarakat desa. Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa mencakup beberapa aspek, yaitu:

- a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif
- b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara, dan mengembangkan pembangunan dengan pendekatan partisipatif
- c. Mendorong dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, serta swadaya masyarakat
- d. Menumbuhkan dan mengembangkan kondisi dinamis dalam masyarakat guna mendukung pemberdayaan masyarakat (Muhtarom, 2016, hlm. 184).

Adapun, fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat dan sebagai mitra pemerintah kecamatan dalam menyikapi dan memenuhi kebutuhan demokrasi masyarakat di bidang pembangunan sebagai katalisator pemberdayaan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan pada pendampingan masyarakat dalam melakukan rencana pembangunan di Kelurahan Cipedes dapat dilakukan dengan melaksanakan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program pembangunan (Ikbar, 2016, hlm. 21). Salah satu contoh program yang dijalankan oleh LPM Kelurahan Cipedes adalah program pengembangan hidroponik yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat terutama kelompok penerima manfaat.

2.1.2.2 Peran Pendamping Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998) dalam Yanuar (2019, hlm. 22), peran diartikan sebagai bagian dari tanggung jawab utama yang perlu dijalankan. Istilah peranan berasal dari kata peran yang mengandung makna ikut serta atau berpartisipasi aktif dalam suatu aktivitas. Sementara itu, peranan merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sesuatu yang memiliki kontribusi penting dalam terjadinya suatu keadaan atau peristiwa. Sejalan dengan pendapat tersebut, (Soerjono Soekanto, 2002 dalam Yare 2021, hlm. 20), peran adalah bagian dinamis dari suatu status. Ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisi atau kedudukan yang dimilikinya, maka hal tersebut disebut sebagai pelaksanaan peran.

Soekanto (2012) dalam Yanuar (2019, hlm. 23), peran yang dimiliki oleh individu perlu dibedakan dari interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Kedudukan seseorang dalam struktur sosial (*social position*) bersifat statis dan lebih menekankan pada fungsi, kemampuan beradaptasi, serta keterlibatannya sebagai anggota masyarakat dalam melaksanakan peran tertentu. Secara umum, peran mencakup tiga aspek utama:

- a. Peran mencerminkan seperangkat norma yang berkaitan dengan posisi individu dalam masyarakat, yang menjadi pedoman dalam bertindak dan berperilaku sosial;

- b. Peran dipahami sebagai suatu konsep mengenai hal-hal yang dapat dilakukan individu dalam kehidupan masyarakat sebagai suatu sistem yang terorganisir;
- c. Peran juga merujuk pada perilaku individu yang memiliki arti penting dalam menjaga keberlangsungan struktur sosial.

Menurut Rahmawati (2017) dalam Amalia (2022, hlm. 30), pendampingan dipahami sebagai proses hubungan sosial antara pendamping dan kelompok sasaran yang bertujuan untuk memperkuat dukungan, mengoptimalkan berbagai sumber daya dan potensi yang dimiliki dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, pendampingan juga berfungsi untuk memperluas akses kelompok terhadap layanan sosial dasar, kesempatan kerja, serta fasilitas pelayanan publik lainnya. Melalui proses ini, diharapkan mampu membantu mengatasi permasalahan yang ada dan mendorong munculnya inisiatif dalam pengambilan keputusan, sehingga kemandirian klien dapat tercapai secara berkelanjutan.

Adapun, peran pendamping yang dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam meningkatkan edukasi melalui program pengembangan hidroponik, berbagai macam yang sudah dilakukan oleh pihak yang bersangkutan guna memberdayakan masyarakat di lingkungan Kelurahan Cipedes Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya. Ssebagai mana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 dalam pasal 4 ayat 2, yaitu:

1) Penampung dan Penyalur Aspirasi Masyarakat

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Cipedes telah menjalankan fungsinya sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat. Hal ini dilakukan melalui sosialisasi dan pertemuan-pertemuan tingkat RT/RW untuk memberikan pentingnya edukasi melalui program hidroponik, serta mendengarkan kebutuhan masyarakat seputar pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Aspirasi ini kemudian disalurkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kelurahan.

2) Peningkatan Kualitas dan Percepatan Pelayanan kepada Masyarakat

LPM di Kelurahan Cipedes turut membantu Pemerintah Kelurahan dalam meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan dengan menyampaikan informasi yang berkaitan dengan program pengembangan hidroponik.

Pendekatan kepada masyarakat dilakukan untuk mendorong mereka terlibat dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasil pembangunan di bidang lingkungan.

- 3) Penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif

LPM di Kelurahan Cipedes terlibat dalam penyusunan rencana pembangunan lingkungan secara partisipatif, termasuk dalam program hidroponik. Pendekatan ini mengajak masyarakat untuk berperan aktif dari perencanaan hingga pemanfaatan hasil program, sehingga tercipta rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan.

- 4) Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat

Dalam menjalankan fungsinya sebagai penggerak partisipasi LPM di Kelurahan Cipedes memberikan motivasi kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam program pengembangan hidroponik. Dengan pemahaman akan manfaat hidroponik terhadap lingkungan, masyarakat diharapkan semakin aktif dalam upaya gotong royong untuk keberhasilan program.

- 5) Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup

LPM di Kelurahan Cipedes menggali dan mengembangkan potensi sumber daya masyarakat serta mendukung upaya menciptakan keserasian lingkungan melalui kegiatan hidroponik. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya yang ramah lingkungan di Kelurahan Cipedes.

- 6) Pengembangan Kreativitas dan Pengarahan Positif bagi Masyarakat.

LPM di Kelurahan Cipedes mengadakan berbagai kegiatan pelatihan yang berfokus pada program hidroponik, dengan tujuan meningkatkan kreativitas serta memberdayakan masyarakat. Selain itu, LPM juga memberikan sosialisasi untuk mendorong masyarakat memahami peran mereka dalam menjaga lingkungan.

7) Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat

Pemberdayaan dan perlindungan hak politik bagi masyarakat kelurahan Cipedes juga dilakukan oleh pihak LPM LPM berperan dalam memfasilitasi masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan lingkungan, seperti hidroponik, sekaligus menjaga hak mereka untuk mendapatkan perlindungan terhadap akses informasi dan program terkait.

8) Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat

LPM di Kelurahan Cipedes berfungsi sebagai media komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, dengan menyampaikan aspirasi serta informasi yang berkaitan dengan program hidroponik. Hal ini memperkuat sinergi antara pihak kelurahan (Ranjamandu, 2019, hlm. 363-364).

2.1.2.3 Indikator Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Indikator LPM dalam pemberdayaan masyarakat digunakan untuk melihat sejauh mana lembaga ini berperan dalam meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat (Minarni, 2014, dalam Ikbar 2016, hlm. 22) peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dapat dikategorikan ke dalam empat indikator, yaitu sebagai fasilitator, mediator, motivator, dan dinamisator. Peran tersebut diterapkan dalam penelitian ini, khususnya pada kelompok penerima manfaat program pengembangan hidroponik, yaitu:

a. Fasilitator

Fasilitator merupakan agen pembangunan yang memiliki tugas untuk mendampingi masyarakat dalam proses pemberdayaan. Tanggung jawab fasilitator mencakup membimbing, serta mengarahkan masyarakat agar dapat mandiri dan mampu mengelola diri melalui kelembagaan yang kuat (Jumrana & Tawulo, 2015, hlm. 21). Hal ini sejalan dengan peran fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat juga dapat dilihat dari tugas LPM yang turut memfasilitasi inisiatif masyarakat dan pembangunan. LPM berfungsi sebagai wadah inisiatif masyarakat dan kerja sama dengan pemerintah Kelurahan untuk mendukung dan memenuhi kebutuhan serta tujuan masyarakat di bidang pembangunan. Oleh karena itu, peran LPM sebagai fasilitator difokuskan pada membantu masyarakat membuat rencana pembangunan

yang salah satunya dilakukan melalui kegiatan Musrenbang/ Musyawarah Rencana Pembangunan (Muhtarom, 2016, hlm. 185).

LPM berperan dalam memfasilitasi kegiatan pengembangan hidroponik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. LPM tidak hanya mengajukan usulan program, tetapi juga memberikan pendampingan kepada kelompok penerima manfaat, terutama dalam memahami dan mengaplikasikan teknik hidroponik. Fasilitasi ini mencakup penyelenggaraan rapat koordinasi, pelatihan teknis hidroponik, serta kerjasama dengan pemerintah kelurahan dan pemangku kepentingan lainnya (Minarni, 2014, dalam Ikbar 2016, hlm. 22).

b. Mediator

Mediator merupakan pihak yang menjembatani komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah dalam proses pemberdayaan, termasuk dalam pelaksanaan program pengembangan hidroponik. Sebagai dinamisator, LPM juga bertugas menyampaikan hasil perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan agar dapat menjadi acuan bagi perencanaan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang yang mencakup seluruh lapisan masyarakat (Aftalitha & Situmorang, 2024, hlm. 144).

Dalam perannya ini, LPM menyampaikan hasil perencanaan dan usulan pengembangan hidroponik kepada pihak terkait, termasuk dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Dengan adanya peran ini, aspirasi dan kebutuhan kelompok penerima manfaat dapat terakomodasi sehingga program hidroponik dapat berjalan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat (Minarni, 2014, dalam Ikbar 2016, hlm. 23).

c. Motivator

Motivator merupakan individu atau kelompok yang mempunyai kemampuan untuk mendorong orang lain agar melakukan suatu tindakan. Selain itu, pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) peran motivator sangat dibutuhkan untuk membangkitkan semangat masyarakat agar mampu melakukan apa yang bisa mereka lakukan demi mewujudkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Peran motivator dalam konteks LPM mencakup peran memberikan dorongan, inspirasi, pendampingan, serta memfasilitasi berbagai

kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat (Darmayanti & Lukman, 2024, hlm. 130).

LPM dalam perannya sebagai motivator mendorong kelompok penerima manfaat untuk aktif berpartisipasi dalam program hidroponik. LPM tidak hanya memberikan pendampingan teknis, tetapi juga memberikan dukungan moral dan semangat agar masyarakat memiliki motivasi dalam mengembangkan dan mengelola sistem hidroponik secara mandiri. Motivasi ini penting untuk membangun mentalitas masyarakat yang lebih mandiri dan berdaya dalam mengelola sumber daya yang ada (Minarni, 2014, dalam Ikbar 2016, hlm. 23).

d. Dinamisator

Dinamisator adalah mengoptimalkan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui pemantauan yang bijaksana terhadap berbagai kegiatan dan program yang berlangsung di lingkungan masyarakat. Dalam hal ini, LPM diharapkan mampu menempatkan diri secara aktif di tengah masyarakat, mencermati kebutuhan yang ada, serta mendorong keterlibatan warga dalam berbagai kegiatan (Fajar et al., 2020, hlm. 652).

LPM memiliki peran dalam memantau, mengevaluasi, dan mengembangkan program hidroponik agar terus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan yang lebih partisipatif, LPM mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi program. Selain itu, LPM juga berusaha untuk memastikan bahwa program ini dapat terus berkembang dan tidak berhenti pada tahap awal implementasi saja (Minarni, 2014, dalam Ikbar 2016, hlm. 24).

Dengan demikian peneliti dapat disimpulkan, bahwa dengan adanya peran sebagai fasilitator, mediator, motivator, dan dinamisator LPM memiliki kontribusi yang signifikan dalam pemberdayaan masyarakat melalui program pengembangan hidroponik. Pendampingan yang diberikan kepada kelompok penerima manfaat bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam menerapkan sistem hidroponik sebagai solusi pertanian berkelanjutan.

2.1.3 Hidroponik

Secara harfiah Hidroponik berasal dari dua kata, "*hydros*" yang berarti air dan "*phonos*" yang berarti kerja, sehingga secara harfiah berarti "kerja air". Hidroponik adalah metode bercocok tanam yang menggunakan air bernutrisi sebagai media tanam. Teknik ini umumnya dikenal dengan biaya implementasi yang relatif tinggi (Masduki, 2017, dalam Siregar & Novita, 2021, hlm. 115).

Hidroponik merupakan metode budidaya tanaman yang menggunakan air sebagai media tanam utama tanpa melibatkan tanah. Oleh karena itu, teknik ini sering disebut juga sebagai "*soilless culture*" atau "budidaya tanpa tanah". Dalam kondisi cuaca yang tidak menentu (ekstrem), metode budidaya tanpa tanah menjadi semakin penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Meskipun hidroponik menggunakan air sebagai media utama, teknik ini tidak memerlukan pasokan air dalam jumlah besar. Dengan demikian, hidroponik dapat dilakukan bahkan di wilayah dengan ketersediaan air yang terbatas. Teknik ini menggunakan air secara lebih efisien dibandingkan budidaya berbasis tanah, sehingga cocok untuk diterapkan di kondisi cuaca ekstrem atau lingkungan dengan pasokan air terbatas (Setiawan, 2019, hlm.8).

Berbeda dengan metode konvensional yang menggunakan tanah, hidroponik tidak memanfaatkan tanah sebagai media tumbuh. Dalam metode tanah, tanaman mendapatkan zat-zat makanan dari tanah itu sendiri, sementara dalam hidroponik, nutrisi diperoleh dari air yang telah diberi campuran zat-zat anorganik yang dibutuhkan oleh tanaman (Mikrajuddin, 2007, dalam Wirawati & Arthawati, 2021, hlm. 2). Menurut Lingga (2011) dalam Wibowo (2021, hlm. 126) beberapa keunggulan dari sistem budidaya hidroponik antara lain waktu tanam yang lebih singkat, hasil yang lebih bersih dan sehat, perawatan yang lebih mudah terhadap hama, gulma, maupun penyakit. Kemampuan untuk budidaya berkelanjutan, harga jual yang lebih tinggi, serta dapat dilakukan di lahan yang terbatas.

Selain itu, hidroponik dapat sebagai solusi masa depan karena mudah diterapkan di berbagai lokasi, seperti lahan yang sempit di daerah perkotaan, bahkan di atas apartemen. Sistem hidroponik mempunyai solusi terhadap berbagai tantangan, termasuk kekurangan lahan, masalah kualitas tanah, serta kendala hama

dan penyakit yang lebih terjaga. Sehingga, hidroponik dapat mengatasi keterbatasan irigasi, ketidakpastian musim dan variasi kualitas yang tidak konsisten. Dengan metode ini, pertanian dapat dilakukan sepanjang tahun tanpa terpengaruh musim, sehingga petani tidak perlu khawatir akan penurunan harga jual hasil panen. Ruang tanam yang bersih, media tanam steril, dan perlindungan dari hujan serta hama membuat tanaman hidroponik lebih sehat, produktif, dan lebih mudah dalam perawatannya (Hartus, 2008, dalam Radinka et al., 2023, hlm. 25).

Jenis-jenis hidroponik dibedakan berdasarkan media yang digunakan untuk menopang tanaman. Media tersebut biasanya tidak mengandung unsur hara, sementara kebutuhan nutrisi tanaman disuplai melalui aliran pipa atau disiramkan secara manual (Waluyo et al., 2021, hlm. 62) hidroponik dianggap hemat air dan tanah, jika dibandingkan dengan metode pertanian konvensional, dan juga memungkinkan aplikasi pada kondisi tertentu dari ruangan dengan pengaturan bebas suhu, dan cahaya yang mendukung pertumbuhan tanaman.

Pengembangan media tanam hidroponik membutuhkan teknik khusus untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman, mulai dari tahap pembibitan hingga tanaman siap dipanen. Media tanam hidroponik bebas dari hama atau parasit yang biasanya ditemukan di tanah, sehingga lebih sehat. Menurut Purbajanti et al. (2017) dalam Nuh et al. (2020, hlm. 111) menyatakan bahwa elemen utama yang diperlukan tanaman sebenarnya bukan tanah, melainkan nutrisi dan air yang tersimpan di dalam tanah yang diserap oleh akar, serta dukungan fisik dari tanah untuk pertumbuhan. Berkebun dengan metode hidroponik memiliki beberapa keunggulan, seperti pertumbuhan tanaman yang lebih cepat, sekitar 20% lebih cepat, hasil panen yang 20% - 25% lebih produktif dibandingkan dengan metode tanam di tanah, serta penggunaan ruang yang lebih efisien. Tanaman yang ditanam secara hidroponik tidak memerlukan sistem akar yang luas untuk memperoleh nutrisi, sehingga metode ini dapat diterapkan di dalam ruangan atau pekarangan.

Metode hidroponik dikenal sebagai teknik penanaman yang menggunakan larutan nutrisi tanpa memerlukan tanah sebagai media tanam. Hidroponik telah membuktikan bahwa tanah tidak diperlukan untuk menumbuhkan tanaman, kecuali unsur-unsur, mineral, dan zat makanan yang biasanya terkandung di dalamnya.

Larutan nutrisi hidroponik dirancang dengan perbandingan yang tepat untuk mengurangi stres pada tanaman, sehingga tanaman tumbuh lebih cepat, dan hasilnya lebih berkualitas. Teknologi hidroponik ini diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat yang memiliki lahan terbatas, seperti pekarangan, untuk memanfaatkan lahan tersebut secara optimal (Roidah, 2014, dalam Khafidin et al., 2022, hlm. 324).

Keuntungan dari penanaman secara hidroponik meliputi: (1) Jaminan keberhasilan tanaman dalam tumbuh dan berproduksi; (2) Perawatan lebih mudah dengan gangguan hama yang lebih terkontrol; (3) Efisiensi penggunaan pupuk; (4) Tanaman yang mati mudah diganti; (5) Metode kerja lebih efisien dengan standar yang jelas; (6) Tanaman tumbuh lebih cepat, bersih, dan tidak rusak; (7) Hasil produksi lebih konsisten dan tinggi dibandingkan dengan penanaman di tanah; (8) Harga jual produk hidroponik lebih tinggi; (9) Beberapa tanaman bisa dibudidayakan di luar musim; (10) Tidak ada risiko banjir, erosi, atau ketergantungan pada kondisi alam; dan (11) Dapat dilakukan di lahan terbatas seperti di atap atau dapur.

Sementara, kelemahan hidroponik meliputi: (1) Investasi awal yang mahal; (2) Memerlukan keterampilan khusus dalam menyiapkan bahan kimia; dan (3) Ketersediaan serta pemeliharaan perangkat hidroponik yang cukup sulit (Roidah & Ida Syamsu, 2014, dalam Thahrim & Jabid, 2020, hlm. 10).

2.1.3.1 Program Pengembangan Hidroponik

Program pengembangan hidroponik adalah program yang membantu masyarakat belajar menanam sayuran tanpa tanah, hanya menggunakan air yang diberi nutrisi sebagai media pengganti. Pada metode ini, tanaman mendapatkan nutrisi secara langsung melalui akar yang ditempatkan dalam media pendukung atau larutan nutrisi yang terus bersirkulasi (Aldi, 2024). Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan atau lahan terbatas sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan khususnya sayuran (Rizky et al., 2022, hlm. 314). Metode yang digunakan pada program pengembangan hidroponik di Kelurahan Cipedes adalah metode hidroponik sistem NFT (*Nutrient Film Technique*).

Sistem NFT (*Nutrient Film Technique*) merupakan metode hidroponik di mana air mengalir tanpa henti selama 24 jam, dengan sebagian akar tanaman terendam dalam air dan sebagian lagi berada di atas permukaannya (Untung, 2000, dalam Zulkifli et al., 2023, hlm. 178). Penyerapan nutrisi melalui akar menjadi aspek penting dalam metode ini. Keunggulan metode NFT mencakup penghematan lahan dengan sistem vertikutur, penggunaan air yang lebih efisien, penghematan pupuk, serta pertumbuhan tanaman yang lebih cepat. Selain itu, tanaman yang dihasilkan memiliki kualitas lebih baik, dan metode ini mampu mengurangi gangguan dari hama penyakit atau gulma dan tanaman pengganggu lainnya. NFT merupakan teknik hidroponik yang menempatkan akar tanaman dalam lapisan air tipis yang mengalir, dengan kandungan nutrisi yang sesuai kebutuhan tanaman. Akar dapat berkembang di dalam larutan nutrisi tersebut, yang mengelilingi perakaran, sehingga sistem ini disebut “*Nutrient Film Technique*” NFT (Lingga, 2011, dalam Zulkifli et al., 2023, hlm. 178).

NFT “*Nutrient Film Technique*” yaitu jenis sistem hidroponik yang menggunakan lapisan tipis air kaya nutrisi untuk mengantarkan nutrisi ke tanaman. Akar tanaman terus-menerus bermandikan larutan nutrisi, yang memberi mereka semua yang mereka butuhkan untuk tumbuh. Air disirkulasikan melalui serangkaian saluran kecil yang ditutup dengan jaring atau saringan. Akar tanaman menggantung ke dalam saluran dan bermandikan air yang kaya nutrisi. Sistem NFT sangat efisien dan dapat diatur dengan mudah (Zulkifli et al., 2023, hlm. 183). Pada sistem ini, nutrisi dalam air dialirkan secara terus-menerus melalui pipa atau saluran di mana akar tanaman menyerap nutrisi tersebut. Sistem NFT efektif untuk menumbuhkan tanaman seperti selada, karena akar tanaman mendapatkan pasokan nutrisi yang stabil dan oksigen yang cukup.

Dalam sistem hidroponik, media tanam tidak berfungsi seperti tanah. Perannya hanya sebagai penopang agar tanaman dapat berdiri dengan baik. Semua nutrisi yang diperlukan tanaman diberikan melalui larutan hara (Yahya, 2021, hlm.7) sistem NFT memiliki kelebihan dan kelemahan, seperti pada sistem hidroponik lainnya. Kelebihannya dari sistem NFT (*Nutrient Film Technique*) diantaranya:

- a. Pemenuhan kebutuhan air yang efisien dan mudah.
- b. Kemudahan penyesuaian konsentrasi dan keseragaman nutrisi sesuai dengan umur dan jenis tanaman.
- c. Kemampuan untuk membudidayakan tanaman beberapa kali dalam periode tanam yang singkat.
- d. Memudahkan pengendalian area perakaran.

Adapun, kelemahan sistem NFT (*Nutrient Film Technique*) meliputi:

- 1) Modal dan biaya perawatan yang lebih tinggi.
- 2) Ketergantungan yang besar pada pasokan listrik.
- 3) Risiko penularan penyakit yang lebih mudah pada tanaman lainnya jika terserang.

2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan

Menurut (Nuh et al., 2020) hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan media tanam hidroponik memberikan dampak positif dalam mendukung ketahanan pangan warga setempat. Menunjukkan bahwa pengembangan media tanam hidroponik memberikan dampak positif bagi ketahanan pangan di daerah dengan lahan terbatas. Model hidroponik yang mereka kembangkan, yaitu sistem “wick” dan “*Nutrient Film Technique*” (NFT), memberikan solusi praktis baik untuk skala rumahan maupun komersial. Dengan penerapan sistem hidroponik membantu meningkatkan hasil produksi pertanian di wilayah dengan lahan terbatas, serta memperkuat akses masyarakat terhadap pangan yang sehat dan berkualitas.

Selain itu, menurut (Waluyo et al., 2021) hasil penelitian menyimpulkan bahwa hidroponik merupakan solusi efektif untuk mengatasi keterbatasan lahan, sebagaimana yang mereka terapkan di Desa Limo. Program ini tidak hanya meningkatkan keterampilan Karang Taruna dalam bercocok tanam menggunakan metode hidroponik, tetapi juga berdampak positif pada ketahanan pangan serta membuka peluang pengembangan usaha pertanian di lahan terbatas. Seiring dengan

perkembangan teknologi dalam bidang pertanian, metode hidroponik menjadi semakin relevan karena semakin sedikitnya lahan yang tersedia akibat sektor industri dan jasa. Teknologi ini menjadi alternatif bercocok tanam tanpa tanah yang efektif untuk masyarakat dengan lahan terbatas, dengan menekankan pada pemenuhan nutrisi tanaman melalui air sebagai pelarut unsur hara. Potensi hidroponik sebagai sumber penghasilan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah yang lahan pertaniannya semakin berkurang, sehingga sejalan dengan upaya pengembangan pertanian berkelanjutan di berbagai daerah.

Selanjutnya, menurut (Haditsti, 2022) hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelatihan hidroponik yang dilaksanakan di Balai Latihan Kerja Lembang berhasil melahirkan sejumlah wirausaha baru di sektor hidroponik. Kesuksesan program ini tercermin dari beberapa peserta pelatihan yang kini telah aktif berwirausaha dalam bidang tersebut. Studi ini, yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Hidroponik Dalam Upaya Membentuk Wirausaha Baru,” menunjukkan bahwa pelatihan hidroponik dapat menjadi alat pemberdayaan masyarakat yang efektif, dengan dampak nyata dalam menciptakan peluang usaha baru di sektor pertanian berkelanjutan, terutama di daerah dengan keterbatasan lahan seperti Kabupaten Bandung Barat. Pentingnya peran pelatihan dalam memberdayakan masyarakat dan mendorong mereka untuk menjadi wirausaha dalam bidang hidroponik.

Kemudian, (Hardiana, 2023) hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa program pelatihan ini memberikan dampak positif bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Banyak peserta yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang stabil, kini mampu mempraktikkan teknik hidroponik untuk meningkatkan pendapatan keluarga mereka. Program ini juga berhasil meningkatkan kesadaran dan kreativitas peserta, membantu mereka memanfaatkan potensi diri untuk lebih mandiri secara ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada bantuan, sehingga mendorong upaya mereka keluar dari kemiskinan.

Adapun, menurut (Kurnia et al., 2023) hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa program pemberdayaan masyarakat melalui tanaman hidroponik di Desa Tambakoso Waru, Sidoarjo. Berdampak positif karena program ini dapat

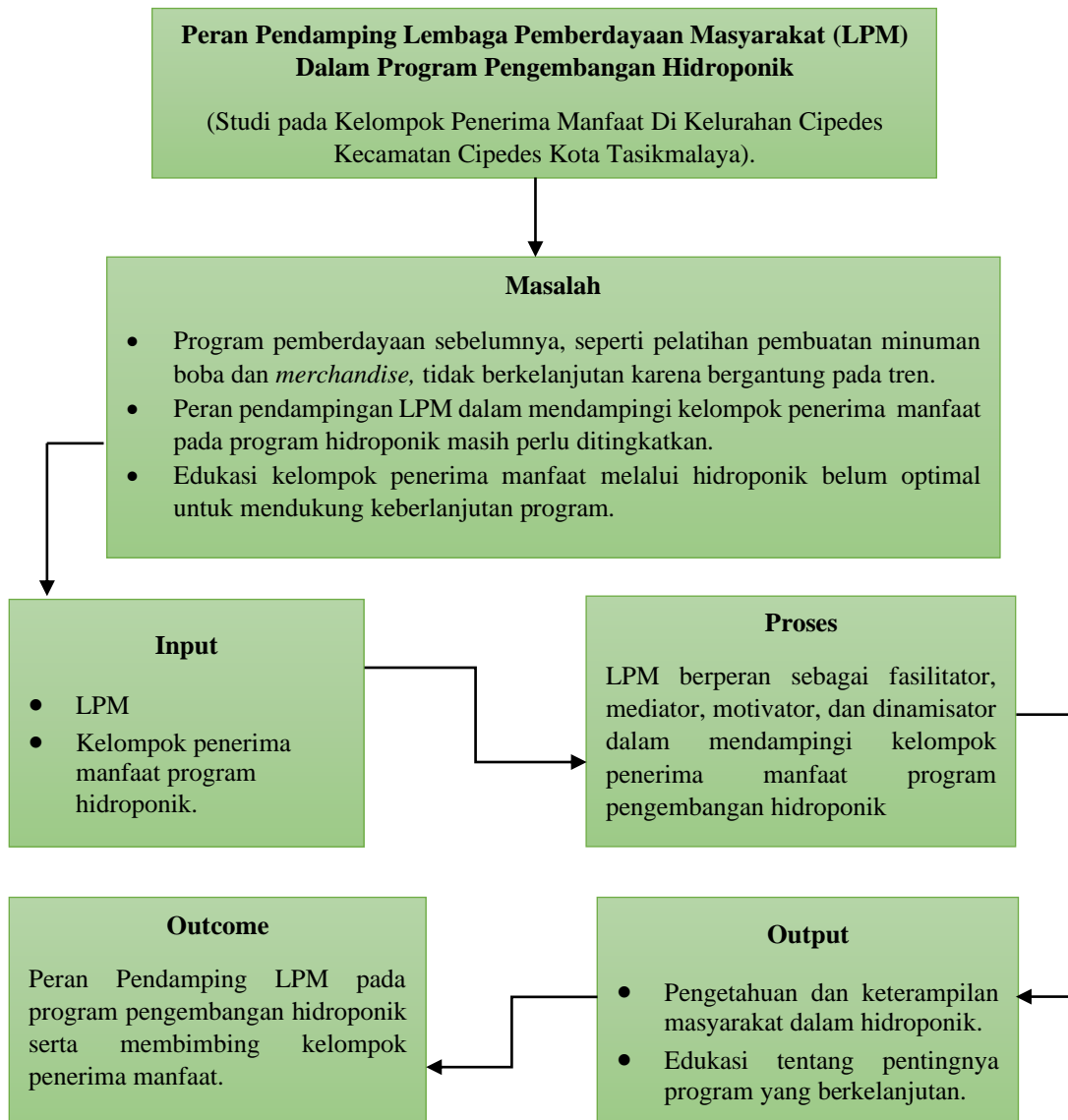
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam teknologi pertanian, mendukung kelestarian lingkungan, efisiensi sumber daya, dan produksi tanaman berkualitas. Pelatihan hidroponik juga mengoptimalkan lahan terbatas dan mengurangi ketergantungan pada lahan tradisional, dengan evaluasi berkelanjutan sebagai kunci dampak jangka panjang.

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan penelitian ini, mengkaji mengenai bagaimana Peran Pendamping lembaga pemberdayaan masyarakat dalam program pengembangan hidroponik (Studi Pada Kelompok Penerima Manfaat Di Kelurahan Cipedes Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya). Penelitian ini memberikan gambaran mendalam tentang Peran Pendamping dalam edukasi, pelatihan, dan pendampingan masyarakat serta dampaknya pada penerapan pertanian ramah lingkungan yang diharapkan berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Peneliti menemukan beberapa permasalahan diantaranya adalah masyarakat masih kurang memahami konsep dan manfaat hidroponik, serta edukasi dalam pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, Peran Pendamping LPM dalam memberikan edukasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan untuk mendukung keberhasilan program ini secara optimal.

Proses penelitian ini adalah Peran Pendamping Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berperan sebagai fasilitator, mediator, motivator, dan dinamisator dalam mendampingi kelompok penerima manfaat program pengembangan hidroponik. Output dari penelitian ini adalah pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam hidroponik, serta edukasi tentang pentingnya program yang berkelanjutan. Sedangkan, outcome dari penelitian ini ialah Peran Pendamping LPM pada program pengembangan hidroponik serta membimbing kelompok penerima manfaat.



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

Sumber: (Data Peneliti 2025)

2.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka pertanyaan penelitian yaitu “Bagaimana peran pendamping Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam memberikan edukasi kepada kelompok penerima manfaat melalui program pengembangan hidroponik?”.